

NASKAH KONSEP HARI KEMERDEKAAN PERS SEDUNIA 2017

1 – 4 mei
Jakarta, Indonesia

Pikiran Kritis untuk Masa Kritis:

Peran media dalam memajukan masyarakat damai,
adil dan inklusif

NASKAH KONSEP



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

NASKAH KONSEP

Menyusul penurunan jumlah peminat media tradisional, menurunnya laba, dan klaim melebarnya kesenjangan antara media dan publik, berkembang biaknya berita bohong terkait peliputan sejumlah peristiwa politik besar pada 2016 merupakan tantangan mutakhir yang berdampak pada sektor media. Wartawan harian Financial Times John Lloyd baru-baru ini memberikan pengamatannya: “Surutnya peran surat kabar secara fisik dan masuknya merek ke Internet telah menempatkan mereka ke dalam arus besar informasi, fantasi, bocoran, teori konspirasi, ekspresi kebajikan dan kebencian.”¹

Namun, setiap tantangan selalu menawarkan peluang. Jim Rutenberg dari harian New York Times telah memperkirakan ledakan berita bohong selama 2016 dapat saja meningkatkan nilai berita benar. Ia berkesimpulan: “Bila demikian halnya, maka jurnalisme hebat lah yang akan menjadi penyelamat jurnalisme.”² Jurnalisme asli, kritis, dan hasil telaah mendalam kiranya lebih diperlukan di masa kini daripada sebelumnya.

Jurnalisme demikian hanya dapat hidup mantap dalam lingkungan yang menopang media bebas, independen dan pluralistik. Bilamana kondisi ini sudah hadir, media memiliki potensi sungguh besar untuk memajukan masyarakat damai, adil dan inklusif. Wartawan Sri Lanka Lasantha Wickrematunge, yang dibunuh 2009, menggambarkan media bebas sebagai “cermin bagi publik untuk dapat memandang dirinya tanpa penghias mata dan bahan gel gaya rambut.” Ia menambahkan: “Dari (itu) Anda jadi memahami kondisi bangsa Anda, khususnya tata kelolanya oleh orang-orang yang Anda pilih untuk memberi anak-anak Anda masa depan lebih baik.”³

Sumbangan media untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan telah diakui dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang disetujui 193 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2015. Kendati Tujuan Pembangunan Milenium (TPM/MDG) yang mengawal upaya pembangunan masyarakat internasional antara 2000 dan 2015 tidak memberi keterangan eksplisit mengenai peran media, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG)

[1] ‘Social media alone understood the Donald Trump story’, Financial Times, 10 November 2016: <https://www.ft.com/content/827b2548-a6a6-11e6-8898-79a99e2a4de6>

[2] ‘Media’s Next Challenge: Overcoming the Threat of Fake News’, New York Times, 6 November 2016: <http://www.nytimes.com/2016/11/07/business/media/medias-next-challenge-overcoming-the-threat-of-fake-news.html>

[3] ‘And Then They Came For Me’, the Sunday Leader, 11 January 2009: <http://www.thesundayleader.lk/20090111/editorial-htm>

mengakui pentingnya akses publik ke informasi dan kebebasan-kebebasan fundamental yang mencakup kebebasan bersuara. Hal ini tertuang dalam SDG 16 (Memajukan masyarakat damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua, serta membangun lembaga-lembaga efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat).

Pengakuan ini mengandung arti besar karena SDG akan mengawal berbagai aksi oleh sejumlah negara selama 15 tahun ke depan dalam menghadapi banyak tantangan sangat mendesak di hadapan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya mengakhiri kemiskinan, memerangi ketimpangan, hingga penanganan terhadap perubahan iklim.

Tetapi, sebagaimana Faith Pansy Tlakula, Rapporteur Khusus Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi dari Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia, mengingatkan kita: “Komitmen keras diperlukan untuk memastikan kebebasan berekspresi dan akses ke informasi menjadi kenyataan, bukan sekedar kata-kata di atas kertas”.⁴ Bagi UNESCO, pelaksanaan efektif SDG akan bergantung pada pembentukan masyarakat berpengetahuan inklusif dengan potensi menghasilkan dampak positif berjangka panjang pada keseluruhan rentang SDG, memajukan akses ke pendidikan, kemakmuran ekonomi, inklusi sosial, perlindungan lingkungan, dan perdamaian. Dalam semua hal ini, peran jurnalisme bebas, pluralistis dan independen merupakan kunci.

Dalam konteks ini, Hari Kemerdekaan Pers Sedunia 2017 berfokus pada bagaimana penguatan jurnalisme bebas dan berkualitas itu vital guna membuat media berdaya dalam memberi sumbangan efektif dalam pemenuhan SDG 16. Secara spesifik, hubungan antara kebebasan berekspresi, keadilan bagi semua, penegakan hukum, pencapaian perdamaian, dan keadaan inklusif akan dijajaki.

“

Dalam konteks ini, Hari Kemerdekaan Pers Sedunia 2017 berfokus pada bagaimana penguatan jurnalisme bebas dan berkualitas itu vital guna membuat media berdaya dalam memberi sumbangan efektif dalam pemenuhan SDG 16.

”

[4] ‘Resolutions to Reality’, Windhoek Declaration 25th Anniversary, 11 April 2016: <http://whk25.misa.org/resolutions-to-reality/>

1

KEADILAN BAGI SEMUA SEBAGAI PRASYARAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penegakan hukum merupakan bagian terpadu dalam sebuah masyarakat demokratis dan inklusif. Ia melindungi kebebasan-kebebasan dasar dan berlaku secara menyeluruh bagi setiap individu dan entitas. Ia merupakan proses melalui mana setiap pelaku dalam masyarakat dituntut pertanggungjawabannya untuk tindak-tanduk mereka. Lembaga-lembaga lemah, badan yuridis lemah, akses kurang ke keadilan secara berarti menghalangi pembangunan berkelanjutan. Tanpa sebuah lingkungan tata hukum dan aturan yang berfungsi baik, publik kehilangan kepercayaannya pada proses demokratis dan tak lagi menanamkan modal dalam masa depannya yang berkelanjutan. Adalah terkait pengertian inilah maka Agenda Pembangunan 2030 mencakup SDG capaian 16.3 yang memajukan “penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional dan [...] akses setara ke keadilan bagi semua”.⁵

Hanya bila media itu bebas, independen dan pluralistis maka media dapat memastikan penegakan hukum dapat diterapkan dan dihormati secara utuh. Jurnalisme investigatif memainkan peran krusial dalam kaitan ini dengan membongkar korupsi politik dan ekonomi serta kejahatan lain. Sebaliknya, hanya bila ada kerangka hukum yang menjaga kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi, maka sektor media demikian baru dapat muncul. Media bebas dan lembaga yuridis independen dan efektif memainkan peran yang saling memperkuat selaku tonggak demokrasi. Hubungan bertali temali ini bersamaan dengan pelaku-pelaku jurnalistik yang patuh pada standar etika dan profesional, berfungsi sebagai prasarana dasar atas mana kebebasan bersuara berikut aneka kebebasan terkait dapat hidup mantap.

Wartawan bukan saja pengguna utama hak sangat tersayangi kebebasan berekspresi melainkan juga perlambang seberapa jauh suatu masyarakat mentolerir dan/atau memajukan kebebasan berekspresi. Apakah wartawan bekerja dalam lingkungan tata hukum yang memungkinkan mereka melaporkan secara independen dan bahkan meliput topik-topik peka? Apakah wartawan menjadi bulan-bulanan karena melaksanakan profesi mereka? Adakah mekanisme perlindungan bagi wartawan? Seberapa jauh serangan dan pelanggaran terhadap wartawan diselidiki? Kondisi keselamatan bagi wartawan sedunia dewasa ini tidak menggembirakan: menurut Laporan Direktur Jenderal UNESCO mengenai

[5] See the full description of Sustainable Development Goal 16 and its associated targets at: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>.

Keselamatan Wartawan dan Bahaya Impunitas (Bebas dari Hukuman), selama dasawarsa terakhir 827 wartawan dan pekerja media telah dibunuh. Hal lebih mencemaskan ialah fakta bahwa hanya 8% dari kasus-kasus ini yang dituntaskan.⁶ Impunitas untuk kejahatan yang dilakukan terhadap wartawan dan kalangan profesional media merupakan halangan besar untuk memastikan keselamatan wartawan dan kebebasan berekspresi secara menyeluruh. Langkanya proses hukum memadai berpengaruh pada setiap anggota masyarakat, karena ini melanggengkan putaran kekerasan dan menciptakan efek mengerikan melalui swasensor. Suara-suara kritis mengenai isu-isu yang berkait dengan kepentingan publik dibungkamkan dan percakapan wacana berdasarkan informasi disumbat.

“

Hanya bila media itu bebas, independen dan pluralistis maka media dapat memastikan penegakan hukum dapat diterapkan dan dihormati secara utuh.

”

Didukung UNESCO sejak 2012, Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas berlaku sebagai panggung berbagai pemangku kepentingan secara menyeluruh di mana isu-isu kompleks tersebut ditangani. Kemajuan besar di garis depan normatif global telah dicapai: kemauan politik untuk mendukung perlindungan wartawan – dan untuk memastikan akses publik ke informasi – telah mengemuka di semua tingkat, terutama di mimbar internasional dan regional, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya resolusi mengenai isu ini yang disetujui dalam tahun-tahun belakangan ini. Keselamatan digital bagi wartawan, enkripsi dan perlindungan narasumber rahasia dalam zaman digital telah menjadi hal utama, termasuk di sekolah-sekolah jurnalisme. Contoh lain atas meningkatnya perhatian pada keselamatan wartawan oleh masyarakat internasional adalah penyertaan di dalam Agenda Pembangunan 2030 sebuah indikator yang menyoroti kasus-kasus serangan dan kekerasan terhadap wartawan (termasuk aktivis hak asasi manusia dan penggerak serikat buruh) untuk mengevaluasi kemajuan pada Capaian 16.10 SDG yang mengusahakan “kepastian akses publik terhadap informasi dan melindungi berbagai kebebasan mendasar, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan persetujuan-persetujuan internasional”.⁷

Tindak menghargai penegakan hukum berkaitan dengan akses ke keadilan bagi semua, di mana hak kebebasan berekspresi bertindak, baik sebagai pengawas maupun pihak yang diuntungkan. Tingkat impunitas begitu tinggi yang tidak bisa diterima pada kasus-kasus kejahatan terhadap wartawan mensyaratkan perlunya kerjasama lebih dekat dengan para pelaku bidang hukum, khususnya pada

[6] Consult the full 2016 UNESCO Director-General Report on Safety of Journalists and the Danger of Impunity as well as its highlights here.

[7] Ibid.

tingkat nasional. Standar dan kebijakan global yang telah digariskan badan-badan antarpemerintah berlaku sebagai pedoman dengan mana perundang-undangan nasional dapat ditetapkan. Satu perkembangan yang sedang mengemuka ialah pembentukan mekanisme perlindungan, pencegahan dan pemantauan cakupan nasional guna mencegah serangan terhadap wartawan dan untuk melawan impunitas.

Sistem yudisial sedunia perlu diperkuat dengan fokus kunci pada perlindungan kebebasan bersuara dan keselamatan wartawan. Seruan Agenda Pembangunan 2030 pada keadilan universal relevan bagi semua unsur pendekatan tiga “P” dalam memastikan lingkungan media aman: Prevention (pencegahan) kekerasan terhadap media; Protection (perlindungan) wartawan dari marabahaya; dan Prosecution (penuntutan) terhadap pelaku kejahatan terhadap kalangan profesional media. Hanya ketika penegakan hukum dihormati dan keadilan bagi semua dijamin, maka kemajuan lebih lanjut dapat dilakukan menuju masa depan lebih baik dan berkelanjutan bagi semua.

Renungan

- Bagaimanakah kita dapat memastikan perlindungan kebebasan-kebebasan mendasar bila penegakan hukum tidak dihormati?
- Apa saja penghalang perlindungan bagi kebebasan-kebebasan mendasar dalam masyarakat dan dalam mencapai keadilan bagi semua?
- Bagaimanakah mekanisme-mekanisme nasional yang berfokus spesifik pada keselamatan wartawan dapat diusahakan?
- Bagaimanakah kerjasama lebih besar dapat diusahakan antara pemerintahan, organisasi masyarakat adab, lembaga yudisial, dan organisasi media dalam menangani isu keselamatan wartawan dan khususnya masalah impunitas (keadaan bebas dari hukuman)?
- Pengembangan kapasitas apa mengenai isu-isu kebebasan bersuara layak diperlukan bagi lembaga yuridis?
- Bagaimanakah kita dapat menjamin bahwa langkah-langkah yang telah disetujui dapat diterapkan dengan efektif?

2

MEMAJUKAN POTENSI MEDIA SEBAGAI KATALISATOR PERDAMAIAN DAN SALING PENGERTIAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) adalah mengurangi secara berarti semua bentuk kekerasan, dan melibatkan pemerintahan dan masyarakat dalam menemukan aneka solusi berdaya tahan atas konflik dan gangguan terhadap keamanan.

Perdamaian, stabilitas, penghormatan pada hak asasi manusia, dan tatakelola pemerintahan yang efektif dan transparan berdasarkan penegakan hukum merupakan wahana penting pembangunan berkelanjutan. Konflik bersenjata, kekerasan dan gangguan terhadap keamanan mengacaukan secara serius upaya-upaya banyak negara dalam mencapai tujuan pembangunan mereka dalam kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Di wilayah-wilayah konflik, sulit melakukan peletakan dasar perdamaian berdaya tahan maupun pertumbuhan ekonomi.

Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional justru merupakan alasan diciptakannya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, menyusul porak porandanya Perang Dunia Kedua. Segaris dengan itu, maksud UNESCO, sebagaimana ditetapkan oleh Konstitusinya, ialah untuk “memberikan sumbangan bagi perdamaian dan keamanan dengan memajukan kolaborasi di antara negara-negara melalui pendidikan, sains, kebudayaan dan supaya dapat meningkatkan penghormatan universal bagi keadilan, penegakan hukum dan demi (...) hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar.”⁸

Menurut Bank Dunia, dua juta jiwa kini tinggal di negara-negara di mana hasil pembangunan dipengaruhi kerentanan, konflik dan kekerasan.⁹ Konsekuensi perang melampaui korban langsung tewas dalam pertempuran. Sebagai akibat konflik dan penganiayaan, diperkirakan 60 juta jiwa telah meninggalkan tempat tinggal mereka baik sebagai pengungsi (19,5 juta), pengungsi dalam negeri (38,2 juta), maupun sebagai pencari suaka.¹⁰ Konflik bersenjata mengarah ke pengrusakan prasarana, pengacauan kegiatan ekonomi, masalah dalam distribusi pangan dan sumber daya lain, pelemahan lembaga sosial, politik dan ekonomi, serta ketidakpastian.

Media kerap memainkan peran sentral dalam situasi konflik dan krisis. Media independen, obyektif, netral dapat membantu memamatkan api penyulut ketegangan,

[8] The full UNESCO Constitution is available here.

[9] World Bank : <http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview>

[10] World Bank : <http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/forced-displacement>. This estimate was published in December 2015.

memajukan dialog, dan meredakan konflik. Sebaliknya peliputan berpihak dan tidak benar dapat membangkitkan kekerasan. Bilamana disalahgunakan untuk tujuan propaganda, media dapat mengipas-ipas kebencian dan menyebarkan rumor.

Hal ini menunjuk pada pentingnya usaha memajukan standar etika dan profesional dalam jurnalisme, khususnya dalam situasi konflik. UNESCO telah sekian lama memajukan peliputan peka-konflik, yang mana memerlukan kedalaman dan ketrampilan analitis lebih besar untuk mengidentifikasi akar suatu konflik; membongkar mitos-mitos yang mungkin membakarnya; menghapuskan salah persepsi antarpihak yang berlawanan; menjelaskan keprihatinan sah masing-masing pihak; memajukan saling pengertian yang dapat membantu terciptanya rekonsiliasi.

Lebih jauh, dalam situasi konflik dan krisis, risiko yang dihadapi wartawan berlipat secara berarti. Beberapa wartawan terjebak dalam kejadian baku tembak, wartawan lain sengaja menjadi sasaran. Selama dasawarsa terakhir, Direktur Jenderal UNESCO telah mengecam pembunuhan 827 wartawan. Hampir 60% wartawan yang tewas dalam kurun waktu 2014-2015 meninggal di wilayah konflik bersenjata. Sorotan terhadap risiko yang terbuka pada wartawan dalam situasi konflik merupakan salah satu tujuan Rencana Aksi PBB pada Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas, yang disetujui 2012.¹¹ Hal ini penting untuk melindungi baik wartawan maupun akses yang mereka sediakan ke masyarakat secara keseluruhan, akses terhadap informasi terpercaya dan penyelamat jiwa dalam saat krisis dan konflik.

Berdampingan dengan peperangan, meluasnya ekstremisme dengan kekerasan yang dikembangkan kelompok-kelompok teroris dan ekstremis seperti Negara Islam di Irak dan Lebanon (ISIL), Al-Qaida, dan Boko Haram menjadi ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan keadilan. Kelompok-kelompok ini telah mendayagunakan media sosial sebagai perangkat untuk komunikasi global dalam waktu-riil pesan-pesan intoleransi, baik yang menyangkut agama, kebudayaan maupun sosial.

Era digital telah meningkatkan peluang atas akses informasi, penciptaan dan tindak berbagi pengetahuan, memfasilitasi pertukaran selain juga dialog antarbudaya. Tetapi meluapnya ujaran kebencian¹² dalam jejaring (daring) memperlihatkan

[11] Coordinated by UNESCO, the UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity is the first concerted effort between all stakeholders to create a free, safe, and enabling media environment around the world.

[12] The proliferation of online hate speech was highlighted in the 2015 report by the UN Special Rapporteur on Minority Issues to the UN General Assembly: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx>

teknologi digital juga memuat sejumlah tantangan. Salah satu diantaranya ialah bagaimana menyeimbangkan dengan tepat kebebasan bersuara daring dan penghormatan pada kesetaraan dan martabat manusia. Ini berarti perlu memperhatikan ciri – ciri spesifik ujaran dalam jejaring, yang mencakup dinamika seperti sifat permanen digital, sifat pergi dari satu tempat ke tempat lain (itinerancy), tidak diketahui jati diri pelaku (anonymity) dan komunikasi lintasbatas yang melintas wilayah hukum berbeda.

“

Media independen, obyektif, netral dapat membantu memati-kan api penyulut ketegangan, memajukan dialog, dan meredakan konflik.

”

Melawan ujaran kebencian dan ekstremisme dengan kekerasan dalam jejaring memerlukan lebih daripada sekedar langkah represif seperti pelarangan atau pemblokiran konten; ia memerlukan pendekatan menyeluruh yang menanggapi penyebab-penyebab akar ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat. Sejalan dengan Rencana Aksi Rabat mengenai larangan mengadvokasi kebencian berdasar kebangsaan, ras dan agama yang berwujud menjadi tindak menghasut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, media memiliki peran kunci dalam hal ini.¹³ Media dapat menyediakan panggung bagi aneka suara dan perspektif yang dapat membantu memantapkan toleransi, dialog, dan pemikiran kritis. Mereka dapat juga menawarkan uraian kontra untuk menantang gagasan-gagasan yang diajukan dalam uraian ekstrim dengan kekerasan. Strategi apapun yang diarahkan untuk melawan ekstrimisme dengan kekerasan harus juga menangani langsung masalah serangan dan pelecehan daring berbasis gender yang sering dialamatkan pada wartawan, politisi dan tokoh perempuan.

Pada akhirnya, melawan uraian ekstremis hendaknya berjalan seiring dengan pemberdayaan pengguna media dengan keterampilan yang diperlukan untuk menakhodai Internet, dan menafsirkan, menolak dan menanggapi pesan-pesan yang menghujat dan menghasut. Pemantapan Melek Media dan Informasi di masyarakat selayaknya menjadi satu tujuan semua negara dalam usaha mereka untuk mencapai Agenda Pembangunan 2030.

Renungan:



Bagaimanakah potensi media untuk memantapkan budaya perdamaian dapat dipercepat?

[13] The Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence was adopted in October 2012 by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and provides recommendations for States in terms of legislation, jurisprudence, and policy to achieve a free and open environment which promotes inclusion and respects diversity.

- Bagaimanakah risiko media berperan dalam posisi lawan, yaitu mengompromi konflik, dapat dihindari?
- Dalam konteks langkah-langkah kontraterorisme, bagaimanakah orang memastikan garis proporsional tanggapan-tanggapan dari pemerintah?
- Apa kiranya paket yang memadai berisi langkah-langkah legal dan nonlegal untuk diterapkan bilamana melawan ujaran kebencian dalam jejaring?
- Bagaimanakah kegiatan Melek Media dan Informasi dapat memberdayakan para pemakai untuk memahami dan mempraktikkan kebebasan bersuara, baik di dalam dan di luar jejaring?

3 KEBEBÁSAN BEREKSPRESI DAN KÉBEBASAN INFORMASI MENUMBUHKEMBANGKAN MASYARAKAT LEBIH INKLUSIF

Dengan hadirnya teknologi digital, arus informasi telah meningkat dalam jumlah besar. Dengan kemajuan dunia dalam melintasi abad ke-21, ketergantungan dunia pada teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah memungkinkan partisipasi lebih luas publik dalam media. Debat terbuka yang dimotori aplikasi berbagi daring dan para produsen konten berita yang menyebarkan berita lewat media sosial baru merupakan dua dari banyak contoh upaya yang diperkuat dalam mencari, menerima, dan menyebarkan informasi.

Diberdayakan oleh teknologi digital, partisipasi publik dalam media memungkinkan demokratisasi dialog naratif dan antarbudaya. ICT menyuburkan keadaan inklusif berkat jangkauan globalnya dan memberi suara bagi semua yang memiliki sambungan internet aktif. Tetapi peningkatan tuntutan akan tambahan informasi telah memperlihatkan secara terbuka peran para perantara internet, kerahasiaan jatidiri narasumber yang menjadi rentan, risiko akan keselamatan digital yang dihadapi wartawan, ditambah pula dengan meningkatnya ujaran kebencian dalam jejaring sebagaimana telah disebut di atas. Ada kebutuhan yang meningkat guna mempertimbangkan hak memperoleh informasi bersamaan dengan nilai

transparansi, dalam kaitan perimbangan memadai antara hak menyebarkan informasi dan hak privasi akan informasi.

Disamping itu, berbagai upaya diperlukan untuk mengatasi ketidaksamaan dalam hal memperoleh akses terhadap informasi, baik di dalam maupun di luar jejaring, serta memastikan bahwa bagian masyarakat yang terpinggirkan merupakan bagian gerakan menuju masyarakat berpengetahuan. Jurang lebar akses terhadap informasi, baik antarnegara dan di dalam negara, juga antara pria dan perempuan, menunjukkan bahwa Zaman Informasi memang menyediakan perangkatnya tetapi belum merealisasikan dunia tersambung penuh yang dicita-citakan. Agar kebebasan berekspresi dapat diterapkan secara universal dan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan mantap, informasi hendaknya tersedia bagi semua tanpa pembatasan. Buta digital merupakan kendala lain yang harus ditanggapi secara menyeluruh sebelum kemajuan berarti dapat dicapai.

Agenda Pembangunan 2030 bertujuan pada “kemampuan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan berjiwa perwakilan di semua tingkat”, hal mana dapat dicapai ketika akses ke informasi sudah universal.¹⁴ Hanya masyarakat yang berpengetahuan baik dan inklusif lah yang dapat menentukan nasib di tangannya, berpartisipasi dalam fungsinya secara demokratis lembaga-lembaganya, dan menuju perdamaian bertahan lama dan sebuah masa depan lebih baik.

Dengan pemberdayaan warga, kebebasan memperoleh informasi merupakan batu penjurus demokrasi partisipatif. Ia juga memainkan peran esensial dalam memajukan lembaga-lembaga akuntabel dan efektif yang menopang penegakan hukum. Ia memastikan para warga dapat menuntut lembaga-lembaga publik untuk menjelaskan pertanggungjawabannya melalui pengawasan publik. Arus berita lebih baik dapat juga meningkatkan efisiensi dan daya tanggap lembaga-lembaga itu, selagi memantapkan kepercayaan warga pada mereka yang memerintah.

Memastikan keadaan inklusif juga mensyaratkan pemberdayaan mereka yang secara tradisional terpinggirkan atau dikecualikan dari partisipasi dan pembentukan wacana publik. Kemajuan menuju pencapaian SDG baru akan terpenuhi bila peluang setara tersedia bagi semua orang, tanpa dikesampingkan karena umur, gender, ras, kesukuan, orientasi seksual, disabilitas, budaya, bahasa, atau latar

“

Media merupakan aktor penting dalam memajukan inklusi sosial. Potensi mereka dalam memajukan dialog, mencerminkan keanekaragaman pendapat dan perspektif [...] sepatutnya dikembangkan.

”

[14] SDG Target 16.7: Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels.

ekonomi atau sosial. Semua orang hendaknya diberi cara menjadi peserta penuh dalam semua aspek kehidupan. Media merupakan aktor penting dalam memajukan keadaan inklusif sosial. Potensi mereka dalam memajukan dialog, mencerminkan keanekaragaman pendapat dan perspektif dalam masyarakat, dan potensi media untuk menantang salah persepsi berdasarkan prasangka (stereotypes) dan tindak membuat kesan salah (misrepresentation), hendaknya dikembangkan. Mendukung pluralisme dan kesamaan gender dalam media merupakan titik pusat dalam proses ini. Perempuan terus secara berarti masih kurang keterwakilannya atau menjadi titik terima kesan salah dalam media di banyak negara, baik dalam kehadiran mereka dalam perusahaan media maupun dalam perwakilan dalam konten media. Peluang-peluang lebih besar hendaknya juga disediakan bagi partisipasi kaum muda, kaum minoritas kelompok etnis dan bahasa, orang dengan disabilitas dan kelompok rentan.

Meningkatnya akses warga ke informasi kadang kala disambut usaha-usaha merambah dan membatasi hak publik untuk bersuara secara bebas. Wartawan dan kaum blogger di seluruh dunia senantiasa menghadapi rangkaian tantangan ketika membongkar kasus pemberitaan dan sering harus membayar dengan nyawa mereka agar informasi sampai ke publik.¹⁵ Kebebasan bersuara dan kebebasan informasi berlaku sebagai syarat sebuah demokrasi yang berfungsi baik dan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Komunikasi dan informasi adalah pendorong perubahan positif dan wartawan merupakan penjelmaan hidup kebebasan-kebebasan ini.

Konsep UNESCO mengenai Universalitas Internet mengusulkan empat prinsip bagi sebuah Internet inklusif yang dapat menyumbang pada pembangunan Masyarakat Berpengetahuan sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Karena sebagian besar kehidupan itu berpaduan dengan Internet, adalah hal yang semakin penting bahwa tata kelola Internet agar dipandu prinsip-prinsip Hak-Hak Asasi Manusia, Keterbukaan, Aksesibilitas dan partisipasi aneka pemangku kepentingan.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 mencanangkan berakhirnya kemiskinan, perlindungan planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua. Ini merupakan agenda universal, dapat diterapkan dan penting di tingkat puncak bagi setiap orang. Hanya sebuah masyarakat inklusiflah, yang difasilitasi media independen dan pluralistis dan lingkungan media aman di mana arus bebas informasi dipelihara, dapat menyediakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai masa depan lebih baik bagi semua.

[15] UNESCO Director-General 2016 Report on the Safety of Journalists and the Danger of Impunity: en.unesco.org/dg-report

Renungan:

- Bagaimanakah publik secara umum dapat dilibatkan secara berarti dalam upaya mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030?
- Strategi inklusif apa saja dapat dikembangkan untuk memastikan bahwa hak mencari dan memperoleh informasi dikuatkan dan dipakai media dan semua kelompok masyarakat?
- Peran apa dapat dimainkan lembaga efektif, akuntabel dan inklusif dalam realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?
- Pembangunan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk mengamankan kebebasan-kebebasan fundamental. Dimanakah titik – titik masuk dan bagaimanakah kita mengkonsolidasi pembangunan kapasitas ini?

KESIMPULAN

S elagi dunia bertolak dalam perjalanan baru menuju Pembangunan Berkelanjutan, Hari Kebebasan Pers Sedunia (WPFH) 2017 menyediakan peluang unik untuk menggarisbawahi peran sentral kebebasan berekspresi suara dan hak memperoleh informasi dalam realisasi TPB/SDG. Kebebasan-kebebasan mendasar ini hendaknya dipandang baik sebagai cara menuju dan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. WPFH hendaknya berlaku sebagai panggung guna mengingatkan kita atas pentingnya mengawetkan jurnalisme tegar di saat ia menghadapi tantangan-tantangan yang semakin bertambah. Ia hendaknya berlaku juga sebagai peluang untuk menyeru pada setiap Negara Anggota agar mengintegrasikan media bebas, independen dan pluralistis, selain juga akses universal ke informasi, ke dalam kerangka kebijakan mereka agar mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



• World Press
• Freedom Day
•
•